BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan sektor ekonomi yang berperan nyata dalam mendorong pembangunan nasional. Di Indonesia, UKM berfungsi sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi dan penyerap tenaga kerja utama. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2023, 65,5 juta unit UKM menjadi pilar utama ekonomi nasional dengan menyerap 97% tenaga kerja dan berkontribusi sebesar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) (Kemenko Perekonomian RI, 2023). Peran strategis tersebut tercermin pada berbagai bidang usaha UKM yang berkontribusi langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

Meskipun UKM memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, keberlanjutan usaha sektor ini masih menghadapi berbagai tantangan serius. Laporan SindoNews (2026) menunjukkan bahwa tingkat kegagalan UKM di Indonesia tergolong tinggi, di mana sekitar 25% usaha mengalami kegagalan dalam dua tahun pertama, lebih dari 80% tidak mampu bertahan hingga tahun ketiga, 45% gagal setelah lima tahun beroperasi, dan 65% tidak bertahan hingga sepuluh tahun beroperasi. Penyebab kegagalan tersebut meliputi manajemen keuangan yang buruk, rendahnya tingkat digitalisasi, kurangnya perencanaan bisnis yang matang, keterbatasan akses modal dan pembiayaan, ketidakpahaman terhadap legalitas usaha, serta kurangnya inovasi dan kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi, perubahan pasar, dan persaingan bisnis.

Hal ini sejalan dengan penelitian Azra (2022), yang mengungkapkan bahwa hampir 80% usaha baru tidak mampu bertahan melewati lima tahun pertama operasionalnya. Kondisi ini berdampak pada rendahnya daya tahan UKM terhadap perubahan kondisi ekonomi, perkembangan teknologi, persaingan pasar, serta sulitnya mengakses sumber pembiayaan formal dari perbankan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep keberlanjutan usaha menjadi penting untuk memastikan UKM tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang secara berkelanjutan dalam jangka panjang.

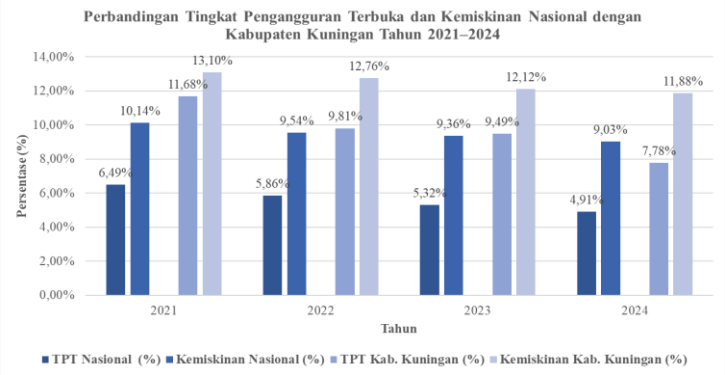
Keberlanjutan usaha UKM didefinisikan sebagai kemampuan usaha untuk mempertahankan operasionalnya dalam jangka panjang. Konsep keberlanjutan usaha ini dapat dianalisis menggunakan pendekatan *Triple Bottom Line* (TBL) yang mencakup tiga aspek utama yaitu *profit* (ekonomi), *people* (sosial), dan *planet* (lingkungan) (Syamsuri & Mashudi, 2022). Aspek *profit* berkaitan dengan kemampuan usaha dalam menghasilkan keuntungan, aspek *people* berkaitan dengan tanggung jawab sosial terhadap tenaga kerja dan masyarakat, sedangkan aspek *planet* berkaitan dengan tanggung jawab terhadap lingkungan. Pendekatan ini menekankan bahwa keberhasilan usaha tidak hanya diukur dari aspek keuntungan semata, tetapi juga dari kontribusi sosial dan lingkungan.

Dari sudut pandang akuntansi, keberlanjutan UKM ditentukan oleh integrasi akuntabilitas keuangan, sosial, dan lingkungan dalam sistem pelaporan sebagai dasar penilaian kelangsungan usaha. Aspek *profit* tercermin dari pengendalian biaya, efisiensi proses, dan pencatatan transaksi yang mendukung profitabilitas usaha secara konsisten, sementara aspek *people* tampak dari kebijakan kesejahteraan karyawan dan keterlibatan sosial yang dicatat sebagai bagian dari biaya operasional. Aspek *planet* diwujudkan melalui biaya efisiensi penggunaan energi dan pengelolaan lingkungan yang terintegrasi dalam praktik operasional usaha (Amaliyah & Putranto, 2025). UKM dapat dikatakan berkelanjutan apabila ketiga aspek tersebut dikelola dan dicatat secara memadai dalam sistem akuntansi.

Pentingnya keberlanjutan usaha UKM terletak pada fungsinya sebagai pilar utama perekonomian nasional, yang mampu membuka lapangan kerja, menyalurkan pendapatan, serta menggerakkan pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal (Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI, 2024). Di Indonesia, UKM memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja dan menjaga stabilitas ketenagakerjaan nasional, yang tercermin dari kemampuannya menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional (Kemenko Perekonomian RI, 2023). Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan UKM tidak hanya berperan dalam menjaga aktivitas ekonomi, tetapi juga mendukung peningkatan

kesejahteraan masyarakat secara luas. Dengan demikian, apabila kapasitas UKM menurun, sektor ini berpotensi kehilangan kemampuannya dalam menciptakan dan mempertahankan lapangan kerja, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Hal ini tercermin dalam data Badan Pusat Statistik dan BPS Kabupaten Kuningan selama periode 2021–2024, sebagaimana tersaji pada Gambar 1.1.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) dan BPS Kabupaten Kuningan, diolah peneliti, 2026

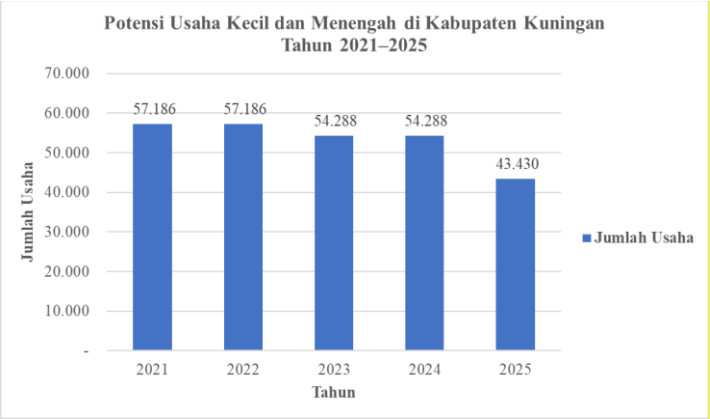
Gambar 1.1 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka dan Kemiskinan Nasional dengan Kabupaten Kuningan Tahun 2021–2024

Berdasarkan Gambar 1.1, tren tingkat pengangguran terbuka di Indonesia menurun dari 6,49% pada tahun 2021 menjadi 4,91% pada tahun 2024, sementara Kabupaten Kuningan juga mencatat penurunan dari 11,68% menjadi 7,78% pada periode yang sama. Persentase penduduk miskin pun menunjukkan pola serupa, yakni menurun dari 10,14% menjadi 9,03% secara nasional, dan dari 13,10% menjadi 11,88% di Kabupaten Kuningan (Badan Pusat Statistik (BPS), 2025, 2026; BPS Kabupaten Kuningan, 2026). Meskipun demikian, tingkat pengangguran terbuka dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Kuningan masih menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata tingkat nasional pada periode yang sama, sehingga kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut masih menghadapi tantangan yang cukup besar. Kondisi ini menegaskan bahwa upaya menjaga keberlanjutan usaha UKM di Kabupaten Kuningan perlu terus diperhatikan, mengingat menurunnya kapasitas UKM berpotensi

meningkatkan kembali angka pengangguran dan kemiskinan di daerah tersebut.

Urgensi penelitian mengenai keberlanjutan usaha UKM di Kabupaten Kuningan semakin meningkat seiring dengan tantangan yang dihadapi pelaku usaha, khususnya dalam manajemen keuangan dan proses digitalisasi (Hamzah, 2025). Oleh karena itu, diperlukan strategi menyeluruh yang menekankan penguatan kapasitas internal dan eksternal, antara lain melalui peningkatan pemahaman akuntansi dan literasi keuangan, penerapan SAK EMKM sebagai standar pelaporan yang mendukung kebijakan pemerintah sekaligus mempermudah akses kredit perbankan, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan usaha. Upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat daya tahan dan menjamin keberlanjutan usaha UKM dalam menghadapi dinamika pasar maupun tantangan global, khususnya bagi UKM yang terdaftar di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Kuningan.

Urgensi penelitian tersebut semakin jelas apabila dikaitkan dengan kondisi empiris di Kabupaten Kuningan. Data pemberitaan terkini menunjukkan bahwa UKM di Kabupaten Kuningan mengalami penurunan kinerja hingga gulung tikar *(collapse)*, dengan faktor utama yaitu lemahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), manajemen keuangan yang tidak disiplin, dan kurangnya kekuatan pemasaran produk (DetikJabar, 2025). Fenomena tersebut diperjelas oleh data resmi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Kuningan tahun 2021–2025, yang menunjukkan penurunan jumlah UKM sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.2.



Sumber: Data diolah peneliti dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Kuningan (2025)

Gambar 1.2 Potensi Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Kuningan Tahun 2021–2025

Kabupaten Kuningan yang dikenal memiliki potensi besar dalam pengembangan UKM ternyata masih menghadapi tantangan serius dalam keberlanjutan usaha. Berdasarkan Gambar 1.2, jumlah UKM di Kabupaten Kuningan menunjukkan penurunan dari 57.186 unit pada tahun 2021–2022 menjadi 54.288 unit pada tahun 2023–2024, dan terus menurun hingga mencapai 43.430 unit pada tahun 2025. Kondisi ini mengindikasikan adanya penurunan sebesar 13.756 unit atau sekitar 24,05% dalam kurun waktu lima tahun terakhir berdasarkan data Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Kuningan tahun 2025. Menurut Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Kuningan (Diskopdagperin), penurunan jumlah UKM tidak sepenuhnya disebabkan oleh penutupan usaha.

Sebagian pelaku usaha yang gagal berkembang memilih bekerja sebagai karyawan di usaha rekan bisnisnya agar tetap memperoleh penghasilan. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran peran pelaku usaha menjadi tenaga kerja. Namun, jumlah UKM di Kabupaten Kuningan tetap mengalami penurunan. Untuk menekan penurunan tersebut, pemerintah menerapkan konsep *triple bottom line*.

Pada aspek *People*, diberikan pelatihan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), meliputi pelatihan manajerial, sertifikasi halal serta Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), digital marketing, dan *public*

speaking. Pada aspek *Planet*, pemerintah memfasilitasi ekosistem usaha berkelanjutan melalui legalitas perizinan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang mencakup ketentuan jarak lokasi produksi dengan rumah penduduk untuk menjaga kenyamanan dan keberlanjutan lingkungan. Sedangkan pada aspek *Profit*, diberikan materi literasi keuangan dan perhitungan HPP, meskipun belum mencakup pencatatan akuntansi secara spesifik.

Diskopdagperin menegaskan bahwa penerapan *triple bottom line* di lapangan masih menghadapi kendala pada tiga aspek utama. Pertama, aspek *People*, yaitu kemampuan SDM pelaku usaha yang masih kurang terampil, minimnya pengetahuan pemasaran melalui teknologi digital seperti *e-commerce*, pencatatan keuangan yang masih dilakukan secara manual, serta kesejahteraan tenaga kerja yang belum terpenuhi karena pemberian upah masih didasarkan pada omzet dan belum sesuai dengan standar Upah Minimum Regional (UMR). Kedua, aspek *Profit*, yaitu perhitungan Harga Pokok Produksi (HPP) yang kurang tepat, biaya promosi yang tidak diperhitungkan, serta penggabungan keuangan pribadi dengan modal usaha yang mengakibatkan pembukuan tidak sistematis sehingga pelaku usaha kesulitan mengakses permodalan perbankan maupun Kredit Usaha Rakyat (KUR). Ketiga, Aspek *Planet* mencakup masih adanya limbah industri rumah tangga dari proses produksi yang belum dikelola dengan baik, tetapi tetap diizinkan beroperasi melalui penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) karena limbah yang dihasilkan berskala kecil.

Selain kendala pada aspek *triple bottom line*, transformasi digital juga menjadi fenomena penting yang memengaruhi keberlanjutan usaha UKM di Kabupaten Kuningan. Perubahan pasar dari tradisional ke arah modern menuntut pelaku usaha untuk lebih memanfaatkan teknologi dalam pemasaran produk. Fenomena ini diperkuat oleh berita aksi ngopi "Dari Pasar ke Ponsel: Transformasi Digital UKM Kuningan" yang memberikan dampak nyata mulai dari peningkatan kesadaran hingga keterampilan digital seperti pemasaran *online*, *e-commerce*, dan manajemen data. Sehingga program ini diharapkan mampu menjadikan UKM Kabupaten Kuningan semakin tangguh, produktif, dan kompetitif di era digital.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital oleh UKM di Kabupaten Kuningan masih terbatas. Banyak pelaku usaha hanya menggunakan media digital sebagai alat promosi sederhana tanpa terhubung dengan sistem yang lebih kompleks, seperti pencatatan berbasis digital, *marketplace* yang efektif, atau platform *e-commerce* terintegrasi. Padahal, penelitian terbaru menegaskan bahwa digitalisasi keuangan UKM berkontribusi pada peningkatan efisiensi operasional, akurasi pencatatan, transparansi pengelolaan, serta kualitas pengambilan keputusan (Ningsih *et al*., 2026). Akibatnya, kesenjangan antara ekspektasi dan implementasi digital berdampak langsung pada keberlanjutan usaha, di mana UKM yang belum mampu beradaptasi menghadapi tekanan kompetitif lebih tinggi dan berisiko gagal mempertahankan operasional maupun pertumbuhan usaha.

Menurut Amanda & Rialdy (2024), faktor yang mempengaruhi keberlanjutan usaha UKM adalah pemahaman akuntansi, penggunaan teknologi informasi, dan implementasi SAK EMKM. Sementara itu, Hamzah (2025) menyebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi keberlanjutan usaha UKM adalah *financial literacy* (literasi keuangan), *accounting literacy* (literasi akuntansi), *mental accounting* (akuntansi mental), *access to finance* (akses keuangan), *innovation* (inovasi), dan *digital transformation* (transformasi digital). Oleh karena itu, penelitian ini menyoroti empat faktor utama yang memengaruhi keberlanjutan usaha UKM, yaitu pemahaman akuntansi, literasi keuangan, implementasi SAK EMKM, dan transformasi digital.

Faktor pertama yang memengaruhi keberlanjutan usaha UKM yaitu pemahaman akuntansi. Pemahaman akuntansi mencerminkan tingkat kecakapan seseorang dalam menguasai akuntansi secara menyeluruh, meliputi aspek pengetahuan dasar maupun tata cara, mulai dari pencatatan transaksi hingga penyusunan laporan keuangan (Najifaturrahmi & Aisyah, 2023). Bagi pelaku UKM, pemahaman akuntansi tidak hanya sebatas pencatatan transaksi, tetapi juga menjadi dasar pengambilan keputusan bisnis yang lebih rasional. Tujuan pencatatan akuntansi, yang diwujudkan dalam

laporan keuangan adalah memberikan informasi terkait posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas perusahaan (Rachmawati & Hidayatullah, 2025).

Hasil penelitian Amanda & Rialdy (2024) menyatakan bahwa pemahaman akuntansi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan usaha UKM. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Trisnadewi & Dewi (2023) yang menemukan bahwa pemahaman akuntansi juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan usaha UKM. Namun di luar temuan tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Solikha *et al*. (2023) menemukan hal bertolak belakang, penelitian yang mereka lakukan menemukan bahwa pemahaman akuntansi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap keberlanjutan usaha UKM. Hasil penelitian yang inkonsisten tersebut menunjukkan adanya celah penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut.

Faktor kedua yang memengaruhi keberlanjutan usaha UKM adalah literasi keuangan, yaitu kemampuan memahami, mengelola, dan mengambil keputusan terkait keuangan secara bijak untuk mencapai kesejahteraan finansial. Pemahaman yang mendalam tentang konsep keuangan dasar memberdayakan pelaku UKM untuk membuat keputusan yang tepat, sehingga berkontribusi pada ketahanan dan keberlanjutan usaha secara keseluruhan (Dwyanti, 2024). Literasi keuangan yang tinggi memungkinkan pelaku usaha mempertahankan stabilitas usaha melalui pengelolaan arus kas yang baik, pemanfaatan layanan keuangan formal, serta pengambilan keputusan investasi secara tepat (Chaidir *et al*., 2025). Oleh sebab itu, peningkatan literasi keuangan menjadi faktor utama dalam memperkuat fondasi manajemen keuangan UKM guna mendukung operasional dan pertumbuhan usaha secara berkelanjutan.

Walaupun literasi keuangan telah banyak diteliti, hasil penelitian terdahulu menunjukkan temuan yang masih inkonsisten dalam hubungannya dengan keberlanjutan usaha UKM. Hasil penelitian Sugita & Ekayani (2022) menemukan bahwa literasi keuangan membantu pelaku UKM mengelola keuangan secara lebih efektif sehingga mampu menjaga kelangsungan usaha,

dan temuan tersebut sejalan dengan penelitian Hamzah (2025), Masdiantini *et al*. (2024), Masdupi *et al*. (2024), Trisnadewi & Dewi (2023), dan Wiagustini *et al*. (2023). Namun demikian, hasil berbeda ditunjukkan oleh Kusuma *et al*. (2021) dan Molina-García *et al*. (2025) yang menyatakan bahwa literasi keuangan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap keberlanjutan usaha UKM. Perbedaan hasil penelitian menunjukkan adanya celah yang perlu dikaji lebih lanjut, khususnya pada UKM terdaftar di Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Kuningan dengan karakteristik serta tingkat pengelolaan usaha yang beragam.

Faktor ketiga yang memengaruhi keberlanjutan usaha UKM adalah implementasi SAK EMKM yang disusun oleh DSAK IAI untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan sederhana sesuai prinsip akuntansi. Standar ini mendukung transisi dari pencatatan berbasis kas menuju akrual, meningkatkan literasi keuangan, serta memperluas akses pembiayaan perbankan sejak resmi diberlakukan pada 1 Januari 2018 (Hamdani *et al*., 2025). Penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM menyajikan informasi akurat, relevan, dan mudah dipahami sehingga bermanfaat untuk menilai kinerja usaha, sekaligus mempermudah akses permodalan karena laporan dinilai memadai oleh kreditur (Setyo & Triyanto, 2023). Dengan adanya SAK EMKM, UKM diharapkan mampu menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi secara lebih mudah dan terarah.

Meskipun SAK EMKM telah diberlakukan sejak 1 Januari 2018 oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), penelitian terdahulu menunjukkan variasi temuan terkait pengaruh implementasinya terhadap keberlanjutan usaha UKM. Penelitian Amanda & Rialdy (2024) menyatakan bahwa implementasi SAK EMKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan usaha UKM. Temuan serupa juga disampaikan oleh Sandari *et al*. (2023) yang membuktikan bahwa implementasi standar ini mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan sehingga mendukung keberlanjutan usaha UKM. Di sisi lain, Tambariki *et al*. (2023) melalui penelitian kualitatif menemukan bahwa implementasi SAK EMKM berpengaruh terhadap keberlanjutan

usaha, namun belum optimal karena keterbatasan pemahaman dan sumber daya manusia sehingga diperlukan penelitian lanjutan secara kuantitatif.

Faktor keempat yang memengaruhi keberlanjutan usaha UKM adalah transformasi digital yang ditujukan untuk memperbaiki kinerja serta memperluas cakupan melalui perubahan interaksi dengan pelanggan, pengelolaan proses internal, dan penawaran nilai bisnis (Komalasari *et al*., 2025a). Proses digitalisasi memberikan solusi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas akses pasar melalui platform *e-commerce* serta strategi pemasaran digital (Angraini *et al*., 2024). Melalui digitalisasi tersebut, pelaku usaha dapat menjalankan bisnis dengan lebih cepat, efisien, dan terbuka terhadap peluang pasar yang lebih luas. Oleh karena itu, transformasi digital menjadi tuntutan yang harus dipenuhi agar UKM mampu bertahan dan bersaing di era digital (Kuswinardi *et al*., 2024).

Meskipun transformasi digital menawarkan banyak manfaat, penelitian terdahulu justru menunjukkan hasil yang inkonsisten. Hasil penelitian Asbeetah *et al*. (2025), Hamzah (2025), dan Krisnayanto *et al*. (2024) menunjukkan bahwa transformasi digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan usaha UKM. Namun, hasil penelitian Saputra *et al*. (2025) menyatakan bahwa transformasi digital tidak berpengaruh signifikan terhadap keberlanjutan usaha UKM. Inkonsistensi temuan tersebut menegaskan pentingnya penelitian lanjutan sehingga pelaku UKM memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dalam menghadapi era digital.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menjawab inkonsistensi temuan terdahulu mengenai pengaruh pemahaman akuntansi, literasi keuangan, implementasi SAK EMKM, dan transformasi digital terhadap keberlanjutan usaha UKM. Kajian sebelumnya tentang implementasi SAK EMKM sebagian besar masih bersifat kualitatif sehingga perlu diuji kembali secara kuantitatif. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti empiris yang lebih konsisten sehingga memperkaya literatur akademik, khususnya dalam konteks Kabupaten Kuningan yang memiliki karakteristik dan tingkat pengelolaan usaha yang beragam.

Berdasarkan penelitian Hamzah (2025), kebaruan penelitian ini terletak pada penguatan pendekatan konseptual dan kontekstual dalam mengkaji keberlanjutan usaha UKM. Secara konseptual, penelitian ini mengganti variabel literasi akuntansi dengan pemahaman akuntansi yang lebih menekankan pada kemampuan aplikatif pelaku usaha dalam menyusun, membaca, dan menggunakan informasi keuangan. Pendekatan ini dianggap lebih relevan secara kontekstual untuk menggambarkan kondisi riil UKM yang membutuhkan keterampilan praktis dalam pengelolaan keuangan. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan gambaran yang lebih tepat mengenai faktor internal yang memengaruhi keberlanjutan usaha UKM.

Selain itu, penelitian ini menambahkan variabel implementasi SAK EMKM sebagai faktor eksternal yang belum banyak dikaji dalam studi terdahulu mengenai keberlanjutan usaha UKM. Standar tersebut berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, transparansi usaha, serta akses pembiayaan yang mendukung keberlanjutan jangka panjang. Penerapan SAK EMKM terbukti meningkatkan keakuratan laporan keuangan dan menyediakan data yang mudah dipahami oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga keuangan, pelaku usaha, dan investor (Amanda & Rialdy, 2024). Dengan demikian, penelitian ini memberikan pandangan yang lebih luas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberlanjutan UKM secara keseluruhan.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena di atas, peneliti tertarik meneliti mengenai **"Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Literasi Keuangan, Implementasi SAK EMKM, Dan Transformasi Digital Terhadap Keberlanjutan Usaha UKM (Studi Empiris pada UKM yang Terdaftar di Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan)".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap keberlanjutan usaha UKM?

2. Apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap keberlanjutan usaha UKM?
3. Apakah implementasi SAK EMKM berpengaruh terhadap keberlanjutan usaha UKM?
4. Apakah transformasi digital berpengaruh terhadap keberlanjutan usaha UKM?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan fakta empiris mengenai:

1. Pengaruh pemahaman akuntansi terhadap keberlanjutan usaha UKM.
2. Pengaruh literasi keuangan terhadap keberlanjutan usaha UKM.
3. Pengaruh implementasi SAK EMKM terhadap keberlanjutan usaha UKM.
4. Pengaruh transformasi digital terhadap keberlanjutan usaha UKM.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat penting bagi berbagai pihak terkait baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dengan memperluas literasi akademik di bidang akuntansi, khususnya terkait pengaruh pemahaman akuntansi, literasi keuangan, implementasi SAK EMKM, dan transformasi digital terhadap keberlanjutan usaha UKM.

1.4.2 Manfaat Praktis

A. Bagi Pelaku UKM

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberlanjutan usaha untuk memperkuat daya saing dan memastikan keberlanjutan usaha UKM.

B. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan atau program

pendampingan untuk meningkatkan keberlanjutan usaha UKM melalui pemahaman akuntansi, literasi keuangan, implementasi SAK EMKM, dan transformasi digital.

C. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan kajian mengenai faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi keberlanjutan usaha UKM, serta memperluas cakupan penelitian pada sektor atau wilayah yang berbeda.